

PERENCANAAN PARTISIPATORI DALAM MEMBUAT PROGRAM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENDIDIKAN

Ninik Hidayati dan Ahmad Zaini

Abstract:

In the field of education, the planning process is one of the key factors in the effectiveness of the implementation of education activities to achieve the expected educational objectives for each level and type of education at the national, as well as local level. However, when viewed in reality everyday, elements of the process of education planning is still more used as a complement or elaboration of policy leaders, so often the goal set is not achieved optimally. One of the reasons is that educational planners still lack understanding of planning processes and mechanisms in a more comprehensive context. In addition, the position of the planning field is not a "key factor" of the existence of an educational institution, both at the macro and micro level, so that the contribution of education planning to the achievement of vision, mission, and educational goals has not been felt optimally.

Key word: participatory planning educational decision making

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan mempunyai prosedur, yaitu suatu cara yang ditempuh dalam kegiatan itu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Prosedur dalam perencanaan adalah cara yang ditempuh oleh para perencana untuk merealisasi usahanya agar dapat terwujud suatu konsep perencanaan. Prosedur perencanaan adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perencanaan. Prosedur yang ditempuh oleh setiap perencana pendidikan seringkali bervariasi, tetapi dalam garis besarnya adalah sama.

Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal pada 25 abad yang lalu, pada abad ke-18 ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan yang berjudul perencanaan universitas di Rusia karya Diderot. Selanjutnya, pada abad ke 19 sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan perguruan pendidikan guru. Menurut albert waterston perencanaan pendidikan adalah merupakan suatu bentuk investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi dan biaya (<http://abyfarhan7.blogspot.com/2012/01/perencanaan-pendidikan.html>, diakses pada 24 September 2012).

Dalam bidang pendidikan, proses perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektifitas keterlaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat

nasional, maupun lokal. Namun apabila dilihat dalam kenyataan kesehariannya, unsur proses perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan pimpinan, sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah para perencana pendidikan masih kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Selain itu, posisi bidang perencanaan belum merupakan “key factor” keberadaan suatu lembaga pendidikan, baik pada tingkat makro maupun mikro, sehingga sumbangan perencanaan pendidikan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan belum dirasakan secara optimal.

Perencanaan Partisipatori

Kata partisipatori berasal dari kata partisipasi yaitu pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Perencanaan partisipatori berarti perencanaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan. Perencanaan partisipatori berarti perencanaan yang melibatkan beberapa yang berkepentingan dalam merencanakan sesuatu yang dipertentangkan dengan merencanakan yang hanya dibuat oleh seseorang atau beberapa orang atas dasar wewenang kedudukan, seperti perencanaan di tingkat pusat kepala-kepala kantor pendidikan di daerah, dan para kepala sekolah. Perencanaan partisipatori banyak melibatkan orang-orang daerah yang memiliki kepentingan atas obyek yang direncanakan.

Perencanaan partisipatif mulai dikenal secara luas sejak munculnya metode partisipatif yang biasa disebut *Participatory Rural Appraisal*. Metode ini menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan (penyelesaian masalah) mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasi masalah sampai pada penentuan skala prioritas.

Perencanaan partisipatif saat ini mulai merambah ke tingkat makro atau lebih pada pengembangan kebijakan, biasanya kegiatan ini lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah (NGO's). Selain itu perencanaan partisipatif banyak dilakukan di tingkat mikro seperti pada tingkat masyarakat maupun di tingkat individu.

Secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.

Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) adalah milik masyarakat, dan berada ditengah-tengah masyarakat. Lembaga pendidikan adalah suatu sistem yang tertentu dalam suprasistemnya. Gambaran ini menunjukkan ada hubungan yang erat antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, yang mengharuskan keduanya menjalin kerjasama, saling memberi dan saling menerima.

Tanpa adanya kerjasama, sebenarnya lembaga pendidikan telah kehilangan sebagian fungsinya, begitu pula halnya dengan masyarakat. Lembaga pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai penerang dan pembaruan masyarakat. Masyarakat tidak lagi memberikan dukungan moral dan material kepada lembaga pendidikan, sama juga kurang menghiraukan perkembangan putra-putrinya. Yang akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak, malah lebih dari itu, bangsa dan negara akan ikut menderita. Masyarakat dan bangsa sudah tentu tidak ingin hal seperti itu akan terjadi. Oleh sebab itu hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat perlu ditingkat.

Guru-guru diharapkan menjadi rantai penghubung antara rumah, para siswa, dan sekolah. Dengan bekerja sama, para orang tua dan guru-guru dapat menyiapkan bersama situasi yang dengan informasi yang digunakan untuk membuat sekolah sebagai tempat memperoleh pengalaman yang positif bagi para siswa maupun para anggota keluarga lainnya. Juga karena pendidikan didukung secara langsung dan tidak langsung oleh orang tua, mereka punya hak dan tanggung jawab untuk terlibat di dalamnya. Melalui kerja sama ini para orang tua akan meneruskan dukungan mereka kepada sekolah baik berupa finasial maupun ide-ide.

Kedudukan masyarakat amat penting dalam menggali potensi untuk mendukung program sekolah mulai dari merencanakan, melaksanakan dan ikut melakukan pengawasan terhadap mutu pendidikan. Peran serta masyarakat dalam manajemen sekolah bukan sekedar peluang, melainkan merupakan tantangan juga bagi lembaga untuk semakin meningkatkan kualitas kinerjanya. Dimensi utama yang hendaknya dikembangkan satuan pendidikan manapun yang senantiasa berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prinsip ini sebagai upaya dapat tetap bertahan dalam zaman dan periode kapanpun (Sagala, 2010).

Antar hubungan lembaga pendidikan dengan komunikasinya merupakan dasar untuk memudahkan pelaksanaan perencanaan partisipatori seperti ini meletakkan sikap dan kebiasaan lembaga pendidikan dan masyarakat bekerja sama membangun

pendidikan. Komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan realisasi teori *common sense* dalam komunikasi, bukan teori kompetisi atau teori kontrol.

Bentuk komunikasi lembaga pendidikan dan masyarakat bukan didasarkan pada kompetisi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing, bukan pula bermaksud lembaga pendidikan agar mengontrol dengan ilmu dan pengetahuannya yang berlimpah atau sebaliknya agar masyarakat mengontrol lembaga pendidikan dengan anggapan lembaga pendidikan menyembunyikan sesuatu. Melainkan karena adanya 3 kepercayaan yaitu (1) orang tua punya hak untuk memahami keadaan lembaga pendidikan, (2) pengetahuan/pemahaman dapat membuat hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, dan (3) hubungan baik tersebut akan memperbaiki sikap dan belajar para siswa/mahasiswa.

Hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat atas dasar *common sense* dengan komunikasinya yang lancar memberi peluang yang besar kepada para perencana melaksanakan perencanaan partisipatori. Suatu perencanaan yang dikerjakan bersama antara personalia lembaga pendidikan dengan orang tua siswa serta dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang berminat akan pendidikan.

Apa dan Mengapa Diperlukan Perencanaan Partisipasi

Melakukan perencanaan bukanlah pekerjaan yang mudah. Merencanakan sesuatu membutuhkan keahlian, sebab itu muncullah ahli-ahli perencanaan dalam segala bidang. Perencanaan-perencanaan itu dikerjakan oleh ahli bersangkutan. Hal itu wajar karena memang tugasnya yang sesuai dengan keahliannya. Mereka bekerja atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Namun sayang, data yang dibuat tidak pernah lengkap, lebih-lebih lengkap dalam arti mencakup data yang *subtle* yang bersifat pribadi dan rahasia.

Tugas utama para ahli perencanaan sesungguhnya adalah membina perencana-perencana tingkat lokal atau daerah, agar mereka dapat merencanakan daerahnya masing-masing dengan baik. Hanya mereka sebenarnya dapat merencanakan lembaga atau lembaga-lembaga pendidikannya dengan baik, sebab mereka yang tahu kondisi daerahnya, cita-cita masyarakat, kemampuan masyarakat dan lembaga mereka yang menghayati keadaan itu dan mereka pula yang sangat berkepentingan akan hasil pembaharuan lewat perencanaan itu. Bukankah ini merupakan alasan yang rasional untuk memberikan mereka menangani sendiri lembaga dan daerahnya? Para ahli perencanaan di tingkat pusat dan propinsi tentu merasa gembira karena para anak buah yang di asuhnya dapat menghasilkan karya perencanaan yang baik.

Jadi perencanaan sekarang tidak lagi memakai pendekatan tradisional yang kebutuhan pendidikannya ditentukan dari luar seperti konsultan atau administrator tertinggi. Tetapi memakai pendekatan baru yaitu para penentuan kebutuhan itulah yang melakukan perencanaan sendiri. Inilah yang disebut perencanaan partisipatori. Dengan asumsi para pengidentifikasi kebutuhan dapat merencanakan perubahan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan motivasi-motivasi yang paling kuat terhadap kebutuhan akan perubahan adalah bila kebutuhan itu diidentifikasi oleh tingkat lokal.

Berikut ini, perbedaan perencanaan tradisional dengan perencanaan partisipatori antara lain:

Perencanaan Tradisional	Perencanaan Partisipatori
1. Peranan perencanaan pendidikan dibawah arahan pengembangan ekonomi.	1. Perencanaan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan secara menyeluruh.
2. Penilaian kuantitatif pada input output sebagai tenaga kerja.	2. Penilaian pada program dan tujuan sistem pendidikan.
3. Perencanaan tingkat nasional.	3. Perencanaan desentralisasi.

Menurut Conyers (1991) ada tiga alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan, yaitu:

1. Alasan pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Alasan lainnya dikemukakan oleh Amartya Sen, dimana Ia mengemukakan ada 3 alasan mengapa harus ada demokrasi dan Perencanaan Partisipatif (<http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2010/05/03/perencanaan-partisipatif/>, diakses 25 Sept 2012), antara lain:

1. Demokrasi dan partisipasi sangat penting peranannya dalam pengembangan kemampuan dasar.

2. *Instrumental role* untuk memastikan bahwa rakyat bisa mengungkapkan dan mendukung klaim atas hak-hak mereka, di bidang politik maupun ekonomi.
3. *Constructive role* dalam merumuskan “kebutuhan” rakyat dalam konteks sosial.

Menurut Made Pidarta (2005) ada beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh para perencana pendidikan, antara lain:

1. Harus tertarik akan masalah-masalah pendidikan atau menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan.
2. Mau belajar dari para perencana pendidikan yang sudah ahli.
3. Memiliki kemampuan intelektual untuk bekerja sama sebagai perencana.
4. Paham berusaha memahami masalah-masalah pendidikan.
5. Merupakan anggota kelompok yang dapat bekerja secara efektif. Jumlah anggota kelompok efektif adalah sekitar 15 orang.

Ramalan dan Pembuatan Keputusan (*Forecasting*)

Forecasting mempunyai arti ganda. Arti yang pertama adalah ramalan yang terbatas, yaitu apa kira-kira yang akan terjadi di lingkungan organisasi pendidikan pada masa yang akan datang. Atau perubahan apa kira-kira yang akan terjadi dalam masyarakat di lingkungan lembaga pendidikan. Misalnya ramalan tentang peledakan penduduk, ramalan tentang perubahan hubungan sosial di masyarakat dan sebagainya. Contoh-contoh seperti itu dikatakan *forecasting* atau ramalan yang terbatas.

Arti *forecasting* yang lebih luas atau lebih lengkap adalah disamping meramalkan keadaan keadaan perubahan dalam lingkungan organisasi, ia juga meramalkan kegiatan atau program organisasinya yang cocok dengan hasil ramalan terhadap lingkungan. Ia berusaha mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi dengan perubahan-perubahan pada organisasi. Agar organisasi pendidikan dan masyarakat sejajar, berjalan maju dalam derap yang sama.

Untuk dapat membuat dan meramalkan kegiatan/program yang tepat dalam lembaga pendidikan dalam usaha menyongsong atau mengantisipasi perubahan lingkungan perlu mengidentifikasi kondisi organisasi yang sekarang. Artinya, kekuatan, kemampuan, dan potensi apa saja yang sudah dimiliki oleh organisasi perlu diketahui secara jelas. Begitu pula kelemahan-kelemahan organisasi itu perlu diidentifikasi. Sesudah hasil identifikasi keadaan organisasi pendidikan ini dikaitkan dengan hasil

ramalan tentang perubahan lingkungan barulah membuat ramalan tentang kegiatan/program untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Jadi, *forecasting* dalam artinya yang lengkap atau luas mempunyai 3 macam kegiatan, antara lain:

1. Meramalkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada lingkungan/masyarakat baik yang dekat maupun yang jauh, yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan.
2. Mengidentifikasi kemampuan, potensi, dan situasi lembaga pendidikan itu sendiri termasuk sumber-sumber pendidikannya. Begitu pula kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi diidentifikasi seluruhnya.
3. Meramalkan atau membuat program baru untuk menyongsong atau mengantisipasi perubahan lingkungan, agar lembaga pendidikan dan masyarakat/lingkungan berjalan berimbangan sama-sama memberi keuntungan.

Kedudukan Ramalan/Forecasting dalam Perencanaan

Lewis menyatakan bahwa asumsi-asumsi dalam pra perencanaan menunjukkan kepada ramalan, yaitu apa yang kira-kira akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan perencanaan mengacu kepada bagaimana seharusnya masa yang akan datang itu.

Memang orang merencanakan sesuatu tidak boleh atas dasar angan-angan belaka tetapi harus didasari oleh data tentang keadaan lingkungan dan lembaga beserta dengan kecenderungan-kecenderungannya. Kecenderungan-kecenderungan itu adalah merupakan ramalan kita. Di atas informasi inilah dibuat suatu program untuk mengantisipasi lingkungan dengan kecenderungannya tadi. Program yang dibuat itu adalah suatu konsep perencanaan.

Dipahami, sesungguhnya ramalan/*forecasting* itu ada dalam perencanaan pendidikan, ia sebelum dan pada saat pembentukan program-program baru. Program atau program-program ini kemudian dianalisis secara sistem untuk mendapat bagian-bagiannya yang lebih kecil dan terkecil. Sesudah itu barulah penyelesaian program-program itu dipikirkan.

Teknik-teknik Ramalan/Forecasting

Ada beberapa teknik untuk membuat ramalan/*forecasting*. Kotler menyebutkan ada 3 macam teknik yaitu ekstrapolasi kecenderungan, metode konsensus dengan teknik

delphi, dan metode matrik dampak silang (*cross-impact matrix methods*). Sementara itu Lewis mengatakan ada tujuh metode yaitu metode delphi, metode ETE (Estimate-Talk-Estimate), metode matematika, metode kecenderungan dan sirkel, metode kohort, metode amalgamasi, dan metode lembaran kerja (*worksheet*). Bila kedua pendapat ini diintegrasikan maka akan diperoleh bagan berikut:

Teknik ramalan/<i>forecasting</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Matematika2. Kecenderungan<ol style="list-style-type: none">a. Ekstrapolasi kecenderungan atau kecenderungan & sirkelb. Kohort3. Konsensus:<ol style="list-style-type: none">a. Delphib. E-T-E atau kelompok nominal4. Amalgamasi5. Lembaran kerja6. Matrik dampak silang

Pengambilan Keputusan

Setiap kegiatan pendidikan selalu disertai dengan pengambilan keputusan, sebab sebelum diputuskan rencana kegiatan itu tidak boleh dilaksanakan. Yang mengambil keputusan pada umumnya adalah manajer tertinggi atau administrator tertinggi atau tim manajer. Tetapi kegiatan diluar rutin dapat diputuskan oleh pejabat/orang lain, sebab kegiatan ini biasanya dilakukan oleh suatu panitia. Dalam hal ini ketua panitia yang memutuskan atas kesepakatan bersama. Kemudian keputusan diserahkan kepada manajer/para manajer atau administrator pendidikan. Administrator beserta staf atau badan tertentu kemudian mempertimbangkan apakah keputusan panitia ini dapat dilaksanakan dalam kegiatan rutin atau tidak.

Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Pendidikan

Perencanaan partisipatori dilakukan oleh suatu kelompok yang dapat dikatakan sebagai panitia perencanaan. Keputusan diambil oleh anggota panitia secara keseluruhan

di bawah kepemimpinan ketuanya. Oleh sebab itu anggota perencana dituntut syarat-syarat seperti diuraikan sebelumnya. Khusus untuk kemampuan intelektual, organ mensyaratkan 3 kualitas yaitu memiliki persepsi yang baik, struktur kongsi, dan nilai-nilai termasuk sikap berani menanggung resiko. Memang merencanakan sesuatu banyak resiko, sebab perencanaan bekerja dengan ramalan-ramalan yang dibuat atas asumsi-umsi. Bila asumsi kurang tepat ramalan menjadi salah, dan ini merupakan resiko. Namun demikian perencanaan tetap harus ada sebab suatu perbuatan pada umumnya lebih berhasil bila didahului oleh perencanaan dibandingkan tanpa perencanaan.

Apa saja yang harus diputuskan oleh anggota perencana? Banyak hal yang harus diputuskan. Mulai dari penentuan kebutuhan, misi, tujuan. Pemecahan dan seterusnya sampai dengan reviu yaitu apakah perencanaan itu perlu direvisi dan diuji coba lagi. Setiap tahap kegiatan harus diputuskan dahulu sebelum dimulai tahap berikutnya. Ditinjau dari segi keputusan, perencanaan itu sesungguhnya merupakan rentetan keputusan.

Ada 5 dasar kekuatan (*power*) untuk mengambil keputusan. Kekuatan itu adalah: (1) paksaan, (2) hadiah, (3) referensi, (4) peraturan/hukum, dan (5) *ekspert*. Dari kelima jenis keputusan tersebut, yang paling cocok dipakai dalam bidang pendidikan adalah keputusan atas dasar peraturan referensi dan atas dasar ekspert. Sebab lembaga pendidikan adalah bersifat birokratis dan kreatif. Ia bersifat birokratis sebab diikat oleh banyak peraturan yang harus ditaati. Bersamaan dengan itu ia juga mempunyai atau diberi wewenang untuk mengadakan kreasi sendiri. Mengapa ia diberi wewenang seperti itu? Sebab guru-guru/dosen-dosen pengasuh lembaga pendidikan itu pada umumnya secara formal sudah ahli dan diasumsikan mereka dapat menggunakan keahliannya dengan sebaik-baiknya. Dengan keahliannya, mereka berkreasi untuk kepentingan kemajuan lembaga pendidikan pada umumnya serta kemajuan siswa/mahasiswa pada khususnya.

Dalam perencanaan pendidikan sebagian besar keputusan dibuat atas dasar ekspert atau keahlian, lebih-lebih keputusan dalam menentukan alternatif pemecahan masalah semuanya atas dasar keahlian. Tidak ada peraturan yang menyangkut alternatif, sebab alternatif baru dibuat ketika mengadakan perencanaan. Hampir setiap perencanaan memakai alternatif-alternatif sendiri.

Keputusan

Keputusan yang baik harus mempunyai dua kriteria, yaitu kualitas dan penerimaan. Keputusan perencanaan yang berkualitas adalah keputusan yang dapat menyelesaikan problem atau tujuan perencanaan. Sedangkan keputusan itu dikatakan memiliki syarat penerimaan kalau para perencana termasuk yang akan mengimplementasikannya setuju akan keputusan tersebut.

Untuk meminimalkan kemungkinan kejelekan suatu keputusan dikembangkan struktur keputusan. Makin berstruktur keputusan itu makin besar kemungkinannya untuk menjadi keputusan yang baik. Atau makin jelas struktur suatu keputusan semakin besar kemungkinannya menjadi keputusan yang baik.

Struktur keputusan adalah terdefinisikan secara jelas bersifat kuantitatif, dan karena itu dapat dihitungkan. Namun ada problem yang muncul dalam membuat suatu keputusan berstruktur, ialah tidak semua alternatif yang akan diputuskan mudah dibuat kuantitatif. Kalaupun dapat kuantitatif tampaknya tidak wajar dan terlalu dibuat-buat. Mengangkakan suatu kualitas tidak mudah. Misalnya untuk membentuk semangat gotong royong pada para siswa perlu menciptakan lingkungan belajar yang dijiwai semangat gotong royong di sini sukar sekali di kuantitatifkan.

Oleh sebab itu dalam batas-batas tertentu sebaiknya alternatif yang dipilih atau diputuskan berstruktur yaitu definitif dan kuantitatif. Ini tidak berarti menutup kemungkinan pembentukan alternatif yang bersifat kualitatif. Alternatif yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif sama baiknya asal dalam bentuk wajar dan cocok dengan masalah yang dipecahkan.

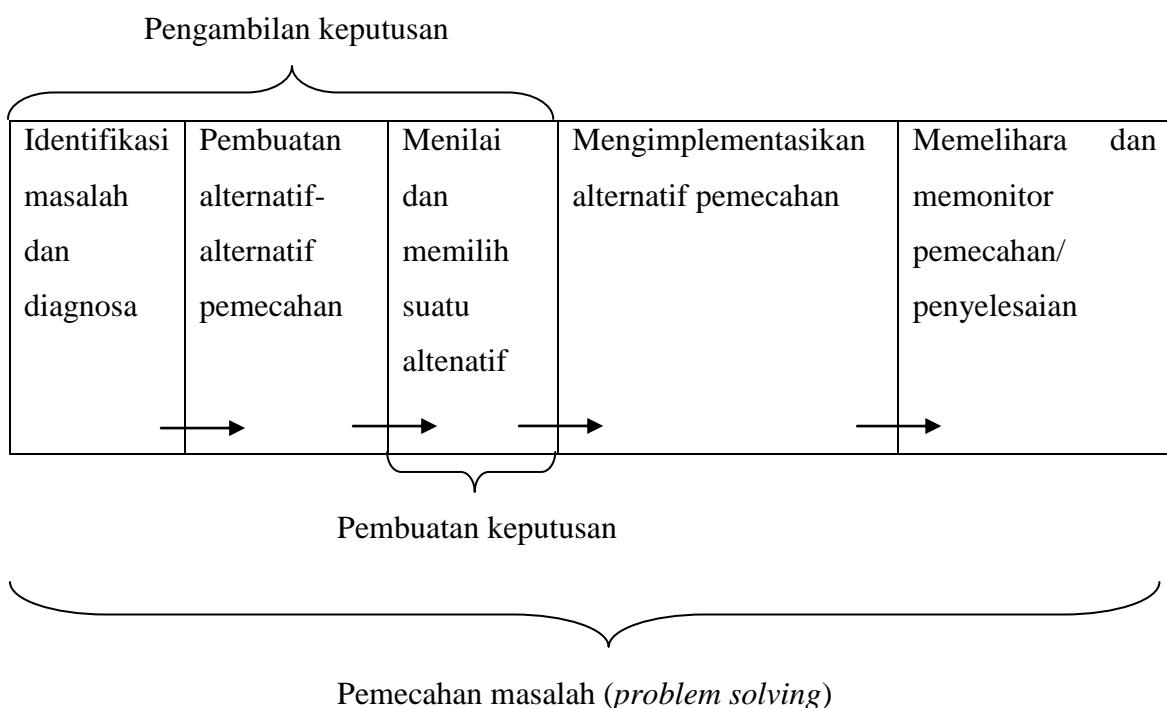
Metode Pengambilan Keputusan

Ada tiga macam pengambilan keputusan metode yang paling mudah adalah yang bersifat tradisional yang keputusannya didasarkan kepada otoritas, pengalaman, dan berpikir logis. Kata otoritas menunjukkan bahwa metode ini kebanyakan dilakukan oleh para pejabat, sebab mereka yang mempunyai otoritas. Dalam dunia pendidikan para pejabat yang mempunyai otoritas memutuskan adalah para manajer atau administrator, terutama manajer/administrator tertinggi.

Melakukan metode tradisional dalam perencanaan pendidikan sama dengan mengundang resiko. Sebab metode ini tidak diuji secara ilmiah. Bersamaan dengan itu, keputusan perencanaan partisipatori selalu dilakukan oleh para perencana sebagai suatu tim atau panitia. Tidak dilakukan secara perseorangan atas dasar otoritas jabatan. Kedua

faktor ini membuat metode tradisional dalam pengambilan keputusan tidak dapat diterapkan dalam perencanaan partisipatori.

Metode pengambilan keputusan yang kedua adalah metode pemecahan masalah (*problem solving*). Metode ini sudah bersifat ilmiah karena alternatif-alternatif pemecahannya dibuat atas dasar data yang tersedia, yang mungkin dapat menyelesaikan masalah itu. Keputusan ini kemudian diuji kembali dalam implementasi. Bila hasil implementasinya baik maka keputusan itu baik, berarti alternatif yang diputuskan adalah baik. Uraian ini mungkin membingungkan. Apakah pemecahan masalah/*problem solving*nya terletak pada pemilihan alternatif atau sampai kepada implementasinya? Supaya lebih jelas marilah kita lihat bagan berikut:



Isi bagan tersebut di atas berturut-turut mulai dari identifikasi mulai dari identifikasi masalah dan diagnosa sampai dengan memelihara dan memonitor pemecahan/penyelesaian adalah merupakan langkah-langkah metode pemecahan masalah. Finch (dalam Pidarta, 2005) membuat langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi masalah, (2) mendefenisikan masalah, (3) menentukan alternatif-alternatif penyelesaian, (4) mengidentifikasi konsekuensi penyelesaian, (5) penyeleksi alternatif yang terbaik, dan (6) memeriksa konsekuensi keputusan. Sementara itu Cunningham membuat langkah-langkah sebagai berikut: (1) mendefenisikan masalah, (2) mencari alternatif-alternatif pemecahan, (3) menjelaskan

konsekuensi masing-masing alternatif, (4) memilih salah satu alternatif yang terbaik, dan (5) mengimplementasi dan mengevaluasi hasilnya.

Oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan metode pemecahan masalah/*problem solving* adalah sebagai berikut:

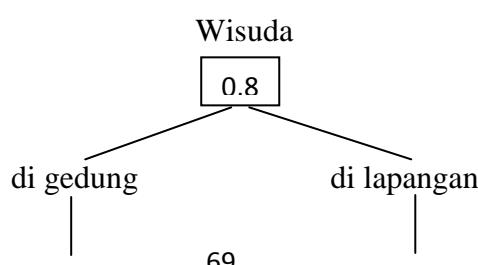
1. Mendefinisikan masalah.
2. Mengumpulkan informasi/data yang relevan dengan masalah.
3. Membuat alternatif-alternatif pemecahan.
4. Menjelaskan konsekuensi tiap-tiap alternatif.
5. Memilih salah satu alternatif yang terbaik.
6. Mengimplementasikan dan menilai hasilnya.

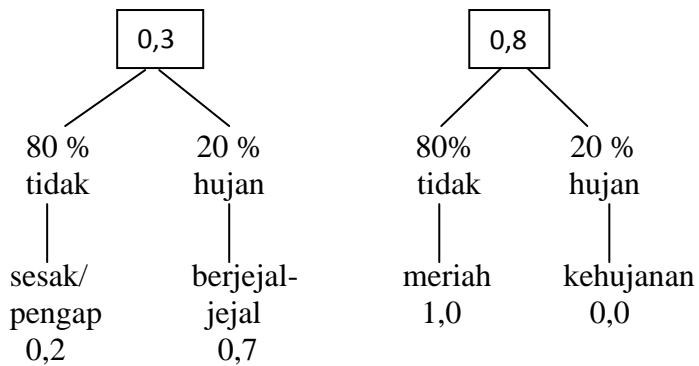
Untuk mengambil keputusan dalam perencanaan pendidikan dalam arti menentukan alternatif pemecahan, cukup sampai pada langkah kelima dari keenam langkah metode pemecahan masalah tersebut diatas.

Metode pengambilan keputusan yang ketiga ialah analisis keputusan pohon (*decision-tree-analysis*). Dikatakan analisis keputusan pohon sebab wujud analisanya menyerupai pohon. Cara kerja metode ini ialah dengan membandingkan alternatif-alternatif yang bersifat kuantitatif, menggunakan langkah-langkah yang logis, yang mudah ditelusuri kembali dan diversifikasi oleh orang lain. Langkah-langkah yang logis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan menunjukkan anatomi masalah dalam bentuk diagram pohon.
2. Menilai konsekuensi pada setiap terminal/cabang pohon.
3. Menentukan probabilitas kejadian pada setiap cabang pohon.
4. Menentukan strategi optimal.

Cunningham (dalam Pidarta, 2005) memberikan contoh yang sederhana dalam pengambilan keputusan yang memakai metode analisis pohon. Suatu panitia mendapat tugas membuat perencanaan partisipatori tentang wisuda mahasiswa. Mereka membuat dua alternatif pemecahan masalah. Berikut ini bagan dari kedua alternatif tersebut:





Perencana pertama kali menggambarkan pemecahan masalah itu dalam bentuk pohon tersebut di atas dengan dua cabang yang merupakan alternatif-alternatifnya. Langkah berikutnya adalah menilai konsekuensi untuk setiap anak cabang pohon, dalam hal ini ada 4 anak cabang. Langkah terakhir ialah menentukan strategi optimal yaitu menghitung berapa kemungkinan terjadi untuk setiap anak cabang pohon.

Bila keputusan tidak memuaskan administrator atau para administrator perguruan tinggi bersangkutan, maka ia/mereka dapat menyuruh meninjau kembali keputusan itu atau menyuruh orang lain untuk meninjau. Mungkin data ramalan kurang tepat atau salah hitung dan sebagainya. Sehingga mungkin keputusan bisa berubah. Proses merevisi inilah yang dimaksud dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan mudah ditelusuri kembali untuk melakukan revisi oleh orang lain dalam uraian di atas.

KESIMPULAN

1. Secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.
2. Bentuk komunikasi lembaga pendidikan dan masyarakat bukan didasarkan pada kompetisi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing, bukan pula bermaksud lembaga pendidikan agar mengontrol dengan ilmu dan pengetahuannya yang berlimpah atau sebaliknya agar masyarakat mengontrol lembaga pendidikan dengan anggapan lembaga pendidikan menyembunyikan sesuatu. Melainkan karena adanya 3 kepercayaan yaitu (1) orang tua punya hak untuk memahami keadaan lembaga pendidikan, (2) pengetahuan/pemahaman dapat membuat hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, dan (3) hubungan baik tersebut akan memperbaiki sikap dan belajar para siswa/mahasiswa.
3. Alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan, yaitu:
 - a. Alasan pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
 - b. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
 - c. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.
4. Ramalan/*forecasting* itu ada dalam perencanaan pendidikan, ia sebelum dan pada saat pembentukan program-program baru. Program atau program-program ini kemudian dianalisis secara sistem untuk mendapat bagian-bagiannya yang lebih kecil dan terkecil. Sesudah itu barulah penyelesaian program-program itu dipikirkan.
5. Ada 5 dasar kekuatan (*power*) untuk mengambil keputusan. Kekuatan itu adalah: (1) paksaan, (2) hadiah, (3) referensi, (4) peraturan/hukum, dan (5) *ekspert*. Dari kelima jenis keputusan tersebut, yang paling cocok dipakai dalam bidang pendidikan adalah keputusan atas dasar peraturan referensi dan atas dasar ekspert.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Ed 2. (Penerjemah: Susetiawan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Farhandi, Abi. *Perencanaan Pendidikan*. Diakses 25 September 2010 dari <http://abyfarhan7.blogspot.com/2010/01/perencanaan-pendidikan.html>
- Pidarta, Made. 2005. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Sagala, Syaiful. 2010. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Arif. *Perencanaan Pendidikan*. Diakses 25 September 2012 dari <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2010/05/03/perencanaan-partisipatif/>